

Judul : Revisi UU Pemilu, coblosan diusulkan digelar seminggu
Tanggal : Minggu, 02 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Pemilu Coblosan Diusulkan Digelar Seminggu

SENAYAN mengkaji usulan agar pemilu tidak digelar serentak dalam satu hari. Gagasan ini dinilai menarik untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu.

Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya siap membahas usulan tersebut dalam rapat pembahasan RUU Pemilu di DPR. "Karena usul itu disampaikan di luar rapat resmi, kami ingin dengar secara menyeluruh apa perbedaan konsep itu dengan sistem pemilu serentak yang selama ini dijalankan," ujar Rifqy di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Legislator Partai NasDem itu menjelaskan, selama ini pelaksanaan pemilu serentak dilakukan dalam satu hari pencoblosan. Pemilu nasional 2024 digelar hanya pada 14 Februari 2024, sementara pilkada serentak pada 27 November 2024, begitu juga saat Pemilu 2019 lalu.

"Sudah begitu kan memang kemarin juga. Pemilu 2019-2024 juga sudah begitu. Kita melaksanakan pemilu waktu yang sama. Sudah di hari yang sama," terangnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai, sistem pemilu serentak dalam satu hari terlalu memaksakan. Karena, Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan waktu lebih panjang agar pelaksanaan pemungutan suara lebih efisien dan sesuai kondisi daerah.

Karena itu, diusulkan pemungutan suara diberi rentang

waktu hingga satu minggu. "Seminggu cukup. Nanti usul saya setiap daerah mengajukan sendiri, terverifikasi," ujar Mardani.

Menurutnya, setiap daerah sebaiknya diberikan keleluasaan menentukan hari pencoblosan dalam kurun waktu seminggu tersebut. Penentuan hari harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat agar partisipasi memilih lebih optimal.

Dia mencontohkan, daerah industri seperti Bekasi akan lebih efektif jika memilih hari Sabtu atau Minggu. "Misal kayak Bekasi kabupaten, itu kan the biggest industrial park di Indonesia, sehingga aktivitasnya padat sekali kalau di hari kerja," katanya.

Selain hari, Mardani juga mengusulkan jam pemungutan suara dibuat lebih fleksibel. Pembukaan tempat pemungutan suara (TPS) bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah. Misalnya, TPS dapat dibuka mulai pukul 12.00 hingga 17.00. "Jadi, nggak pagi hari seperti biasanya. Jadi, nggak harus jam 09.00 sampai 12.00," jelas anggota Fraksi PKS itu.

Dia menambahkan, fleksibilitas waktu tersebut bisa menyesuaikan kebiasaan masyarakat tanpa mengganggu aktivitas utama mereka. Bagi warga Nasrani misalnya, TPS yang buka siang hari akan lebih nyaman karena mereka bisa beribadah terlebih dahulu. ■ **PYB**